

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

**TANGGAL 30 JUNI 2026 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 JUNI 2026 DAN 2025 (TIDAK DIAUDIT)**

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Keuangan Interim

Laporan Posisi Keuangan Interim	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim	2
Laporan Perubahan Ekuitas Interim	3
Laporan Arus Kas Interim	4
Catatan atas Laporan Keuangan Interim	5

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 100, Jati Wetan, Kecamatan
Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59346
Telp Kantor : (0291) 438449
Reservasi : (0291) 438449 (Hunting), 431897



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM TANGGAL 30 JUNI 2026

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk
No. 033/GPP/DIR/SPD/VII/2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Edwin Leonardo
Alamat Kantor : (Jl. R. AKBP Agil Kusumadya 100, Kudus, Jawa Tengah)
Nomor Telepon : (0291) 438449
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Oei, Selima Ivena Wijaya
Alamat Kantor : (Jl. R. AKBP Agil Kusumadya 100, Kudus, Jawa Tengah)
Nomor Telepon : (0291) 438449
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Griptha Putra Persada Tbk;
2. Laporan keuangan PT Griptha Putra Persada Tbk telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Griptha Putra Persada Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan PT Griptha Putra Persada Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Griptha Putra Persada Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kudus, 30 Juli 2026

Edwin Leonardo
Direktur Utama

Oei, Selima Ivena Wijaya
Direktur



@hotelgriptha

www.griptha.com



corporate-secretary@griptha.com

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2026</u>	<u>31 Desember 2025</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	4	173.611.399	380.807.118
Piutang Usaha Dari Pihak Ketiga	5	1.237.078.328	202.199.984
Persediaan	6	1.497.579.527	1.586.341.848
Uang Muka	7	223.979.194	801.908.224
Aset Lancar Lainnya	8	212.153.631	223.571.561
Jumlah Aset Lancar		3.344.402.079	3.194.828.735
ASET TIDAK LANCAR			
Persediaan	6	1.314.765.650	1.296.197.710
Aset Tetap	9	91.236.638.355	91.955.551.693
Aset Hak Guna	10	4.213.533.433	4.058.469.328
Jumlah Aset Tidak Lancar		96.764.937.438	97.310.218.731
JUMLAH ASET		100.109.339.517	100.505.047.466
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	11	519.120.231	451.029.950
Pendapatan Diterima Dimuka	12	458.754.536	497.847.920
Utang Pajak	13a	526.239.472	830.172.488
Beban Akruai	14	420.769.345	369.199.424
Bagian Lancar Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Bank	15	3.225.885.714	3.225.885.714
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		5.150.769.298	5.374.135.496
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Jangka Panjang Dikurangi			
Bagian Lancar			
Utang Bank	15	12.551.462.611	14.164.862.611
Liabilitas Imbalan Pascakerja	16	2.043.341.722	1.903.017.555
Liabilitas Pajak Tangguhan	13c	1.606.049.040	1.532.837.108
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		16.200.853.373	17.600.717.274
JUMLAH LIABILITAS		21.351.622.671	22.974.852.770
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal			
Rp 25,- per Saham			
Modal Dasar Ditempatkan dan Disetor			
Sebesar 1.000.000.000 Saham	17a	25.000.000.000	25.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	18	13.318.507.863	13.318.507.863
Penghasilan Komprehensif Lain	19	32.693.576.435	32.693.576.435
Saldo Laba	17b		
Ditentukan Penggunaannya		1.430.000.000	30.000.000
Tidak Ditentukan Penggunaannya		6.315.632.548	6.488.110.398
JUMLAH EKUITAS		78.757.716.846	77.530.194.696
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		100.109.339.517	100.505.047.466

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk
LAPORAN LABA RUGI dan PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
 Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2026 (Enam Bulan)	2025 (Enam Bulan)
PENDAPATAN USAHA	20	15.717.326.317	14.726.186.795
BEBAN LANGSUNG	21	(7.755.010.214)	(6.803.132.355)
LABA BRUTO		7.962.316.103	7.923.054.440
Beban Umum dan Administrasi	22	(5.518.317.344)	(5.670.140.238)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	23	(32.053.217)	(18.916.297)
LABA USAHA		2.411.945.542	2.233.997.905
Beban Bunga dan Keuangan	24	(892.430.811)	(726.725.109)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.519.514.731	1.507.272.796
Beban Pajak Penghasilan:			
Estimasi Beban Pajak Kini	13b	(218.780.649)	(270.328.546)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	13c	(73.211.932)	(61.362.862)
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		(291.992.581)	(331.691.408)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		1.227.522.150	1.175.581.388
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		1.227.522.150	1.175.581.388

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2024	25.000.000.000	13.318.507.863	32.601.704.070	30.000.000	3.345.953.405	74.296.165.338
Laba Periode Berjalan	-	-	-	-	1.175.581.388	1.175.581.388
Saldo per 30 Juni 2025	25.000.000.000	13.318.507.863	32.601.704.070	30.000.000	4.521.534.793	75.471.746.726
Saldo per 31 Desember 2025	25.000.000.000	13.318.507.863	32.693.576.435	30.000.000	6.488.110.398	77.530.194.696
Cadangan Umum	-	-	-	1.400.000.000	(1.400.000.000)	-
Laba Periode Berjalan	-	-	-	-	1.227.522.150	1.227.522.150
Saldo per 30 Juni 2026	25.000.000.000	13.318.507.863	32.693.576.435	1.430.000.000	6.315.632.548	78.757.716.846

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**LAPORAN ARUS KAS INTERIM**

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2026 (Enam Bulan)	2025 (Enam Bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5,12,20	14.643.354.589	14.080.757.519
Pembayaran Kas Kepada Karyawan	8,19,21,22	(4.556.869.083)	(2.814.677.641)
	6,7,9,10,		
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	11,14,19,21	(2.702.090.900)	(3.268.662.328)
Pembayaran Kas untuk Beban	8,13,19,		
Operasional Lainnya	22,23	(2.937.829.258)	(3.389.198.020)
Kas Dihasilkan dari Operasi		4.446.565.348	4.608.219.530
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	24	(892.430.811)	(726.725.109)
Pembayaran Pajak Penghasilan	13	(303.933.016)	(454.486.391)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		3.250.201.521	3.427.008.030
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	9	(1.843.997.240)	(3.828.634.693)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(1.843.997.240)	(3.828.634.693)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Pinjaman Bank	15	(1.613.400.000)	(3.026.972.302)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(1.613.400.000)	(3.026.972.302)
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(207.195.719)	(3.428.598.965)
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE		380.807.118	3.604.180.842
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERIODE		173.611.399	175.581.877

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Griptha Putra Persada Tbk ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 26 tanggal 14 April 2010 dari Drs. Ika Slamet Riyono S.H., Notaris di Kudus. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33984.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan terakhir dengan Akta No. 47 tanggal 29 Mei 2024 dari Rini Yulianti S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur, mengenai perubahan susunan Direksi perseroan, serta persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten. Akta Perubahan ini telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0129667 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan maksud dan tujuan Perusahaan adalah bidang perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha yaitu Hotel Bintang, Restoran dan MICE. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 1 Juli 2015 dengan menggunakan nama Hotel Griptha yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah.

Perusahaan adalah pemilik dan pengelola Hotel Griptha yang berdomisili di Kudus dengan kantor beralamat di Jl. R. AKBP Agil Kusumadya, Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah.

Pada saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang perhotelan yaitu mengelola Hotel Griptha dan yang berlokasi di Jl. R. AKBP Agil Kusumadya 100, Kudus, Jawa Tengah.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah 65 dan 70 (Tidak Diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Mulia Jaya Palma, dengan Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng sebagai pengendali terakhir.

1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026
<u>Dewan Komisaris</u>	
Komisaris Utama	: Anita
Komisaris Independen	: Anita
Komisaris	: Ewert Yapius Yusuf
<u>Dewan Direksi</u>	
Direktur Utama	: Edwin Leonardo
Direktur	: Oei, Selima Ivena Wijaya

Pada Akta terakhir No. 50 tanggal 15 Juni 2026 dari Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01. 09-0372229 Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026 terdapat perubahan susunan Direksi Perusahaan.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2025

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antanius Feliks Santoso
Komisaris Independen	: Ivarianie Virgiana
Komisaris	: Wira Tjahaja

Dewan Direksi

Direktur Utama	: Oei, Aqulia Jemmy Priyanto
Direktur	: Oei, Selima Ivena Wijaya

Pada Akta terakhir No.47 tanggal 29 Mei 2024 dari Rini Yulianti S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur. Dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0129667 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024 terdapat perubahan susunan Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Griptha Putra Persada Tbk No. 001/GPP/KOM/SPen/IX/2023 tanggal 27 September 2023, Perusahaan mengangkat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	: Anita
Anggota Komite Audit	: Rossy Ronita
Anggota Komite Audit	: Feliks Kumiawan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Griptha Putra Persada Tbk No. 002/GPP/KOM/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, Perusahaan mengangkat Anita sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan, efektif sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Griptha Putra Persada Tbk No. 194/GPP/DIR/SPb/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, Perusahaan mengangkat Fransiska Bella Yunita sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut.

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direksi.

1.c. Penawaran Umum Pemegang Saham

Pada tanggal 10 Januari 2024 Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-4/D.04/2024 untuk melakukan penawaran umum perdana 200.000.000 saham kepada masyarakat. Pada tanggal 18 Januari 2024, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 18 Januari 2024, 800.000.000 saham milik Pemegang Saham pendiri telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

1.d. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan peraturan pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali bila dinyatakan lain.

2.c. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisi berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amandemen PSAK 221 "Pengaruh Ketertukaran/Perubahan Kurs Valuta Asing": Kurs Valuta Asing terkait Kekurangan.

Amendemen berikut yang relevan untuk Perusahaan akan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada:

1 Januari 2026

- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.
- Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan": Klasifikasi dan Pengukuran": Instrumen Keuangan.
- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Keuntungan atau Kerugian dari Penghentian Pengakuan.
- Amandemen Panduan Implementasi PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan selisih ditangguhkan antara nilai wajar dan harga transaksi.
- Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan": Penghentian Pengakuan Liabilitas Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 110 "Laporan Keuangan Konsolidasian": Penentuan 'Agen De Facto'.
- Amandemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas": Laporan arus kas untuk investasi pada anak perusahaan, asosiasi, dan ventura bersama yang menggunakan metode biaya perolehan.

1 Januari 2027

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Penerapan dari amandemen dan interpretasi di atas tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap Laporan Keuangan pada periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas yang lain.

(i). Aset Keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan bank dan piutang usaha dari pihak ketiga.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("*EIR*"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut. Amortisasi *EIR* dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan bank, dan piutang usaha.

- 2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

- 1) Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- 2) Perusahaan telah mengalihkan hal kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima.

(ii). Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
 - 2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.
- Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, yaitu pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan telah berakhir.

(iii). Instrumen Keuangan Disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum tidak boleh tergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan harus dapat dilaksanakan dalam kondisi bisnis yang normal dan dalam keadaan lalai, tidak dapat membayar atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

2.e. Transaksi Pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi, sebagaimana yang diuraikan dalam PSAK 224: "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 27 atas Laporan Keuangan.

2.f. Dana Cadangan Untuk Penggantian Perabotan dan Perlengkapan Hotel

Pemasukan yang diperoleh dari hasil pengelolaan hotel harus diambil sebagian terlebih dahulu untuk dimasukkan sebagai Dana Cadangan yang diperlukan untuk penggantian, penambahan perabotan dan semua perlengkapan yang tidak dapat digunakan lagi dalam pengelolaan hotel.

Besar Dana Cadangan tersebut adalah 1% dari Pendapatan Total (*Total Revenue*).

Dana Cadangan secara khusus disisihkan untuk menutupi cadangan dan disimpan dalam rekening bank.

Dana Cadangan yang tidak digunakan dalam tahun-tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun-tahun berikutnya.

Dana secara khusus disisihkan untuk menutupi cadangan dan disimpan dalam rekening bank. Bunga yang diperoleh dari rekening bank tersebut merupakan bagian dari dana cadangan.

Beban penggantian dan penambahan perabotan dan perlengkapan hotel mengurangi saldo dana cadangan.

2.g. Persediaan

Berdasarkan PSAK 202, "Persediaan", persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan, masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

2.h. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri atas saldo kas (*cash on hand*) dan bank yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 216, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap selain tanah dan bangunan diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada). Tanah dan bangunan dicatat menggunakan model revaluasi yang nilai wajarnya diukur secara andal pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi tiga atau lima tahun sekali.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK, dan disusutkan (Model Revaluasi). Model revaluasi pada tanah dan bangunan baru berlaku sejak 31 Juli 2023. Revaluasi dilakukan 5 tahun sekali untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dikreditkan pada surplus revaluasi aset tetap sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat didalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Jika jumlah tercatat aset tanah dan bangunan meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun	Persentase
Bangunan dan Prasarana	40	2,5%
Peralatan Hotel	4 dan 8	25 dan 12,5%
Peralatan Kantor	4	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Perusahaan memiliki keyakinan masa manfaat bangunan hotel dapat mencapai 40 tahun sehubungan dengan perawatan gedung, sarana dan prasarana hotel dilakukan secara rutin.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

2.j. Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 116, "Sewa", aset hak- guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Hak-Guna	Masa Manfaat
Bangunan	20 Tahun

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

2.k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

2.l. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 terkait Cipta Kerja.

Imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

2.m. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset tersebut dan biaya pinjaman telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansial yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

2.n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Perusahaan menerapkan PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Berdasarkan PSAK ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*overtime*) atau pada waktu tertentu (*at a point in time*).

Perusahaan mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
3. Pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Jika suatu kewajiban pelaksanaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu (*at a point in time*) dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mempertimbangkan indikator pengalihan pengendalian antara lain:

1. Entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset.
2. Pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset.
3. Entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset.
4. Pelanggan memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset.
5. Pelanggan telah menerima aset.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

2.o. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025, pendapatan diterima dimuka yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek merupakan uang muka tamu, uang muka *event* atau agen travel.

2.p. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak memengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal *goodwill*.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

2.q. Laba Per Saham

Berdasarkan PSAK 233, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

2.r. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (Peristiwa Penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (Peristiwa Non Penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.s. Biaya Emisi Saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

2.t. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka disajikan sebesar nilai harga perolehannya dan biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG MATERIAL

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya memengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi memengaruhi kedua periode tersebut.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

Imbalan Kerja

Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya untuk imbalan pascakerja termasuk tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban imbalan pensiun. Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji dimasa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas terkait. Dalam menentukan tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikan dengan perencanaan bisnis masa mendatang.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 216 dan PSAK 116, masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat memengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

Nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN BANK

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas	129.289.797	134.763.111
Bank		
Bank Rakyat Indonesia	135.178.270	160.361.893
Bank CIMB Niaga	72.597.285	30.471.270
Bank Mandiri	41.772.735	251.637.439
Bank Central Asia	2.947.924	8.658.301
Bank BPD Jawa Tengah	1.941.300	2.091.300
Bank Negara Indonesia	1.037.719	16.176.303
Bank Mega	1.000.000	-
Bank Maybank Indonesia	-	219.062
Jumlah	385.765.029	604.378.679
Dana cadangan untuk Penggantian Perabotan dan Perlengkapan Hotel (Catatan 8)	(212.153.630)	(223.571.561)
Bersih	173.611.399	380.807.118

Dana cadangan untuk penggantian perabotan dan perlengkapan hotel merupakan dana yang secara khusus disisihkan untuk pembelian perabotan dan perlengkapan hotel. Dana ini dicatat sebagai aset lancar lainnya (Catatan 8).

Perusahaan membentuk cadangan untuk penggantian perabotan dan perlengkapan hotel dengan persentase sebesar 1% dari pendapatan hotel yang kemudian dikurangi oleh pembelian peralatan dan perlengkapan operasional hotel pada tahun berjalan.

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 saldo kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga dan tidak dijaminkan.

5. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Korporasi	1.004.512.418	101.399.615
<i>Banquet</i>	183.570.000	-
Biro Perjalanan	34.988.900	68.141.375
Mesin <i>EDC</i>	14.007.010	32.658.994
Jumlah Piutang Usaha	1.237.078.328	202.199.984

Rincian Pihak Ketiga sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
PT Djarum	556.664.986	30.150.000
BPS Kudus	500.184.027	-
Savoria Catering	50.316.154	28.749.615
PT Perada Swara Productions	33.415.000	-
MG Holiday	14.935.000	-
PT Karya Cipta Solusi Internasional	9.450.000	14.487.500
PT Agoda International Indonesia	6.697.674	21.077.322
PT Trinusa Travelindo (Traveloka)	6.581.900	40.058.153
PT Karya Cipta Solusi Internasional	-	14.487.500
PT Sami	-	18.400.000
Lain-lain dibawah Rp 10.000.000	58.833.587	49.277.394
Jumlah Piutang Usaha	1.237.078.328	202.199.984

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Umur Piutang Usaha sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Berdasarkan Umur:		
Belum Jatuh Tempo	963.151.400	155.278.875
Jatuh Tempo:		
1-30 Hari	273.926.928	46.921.109
31-60 Hari	-	-
Jumlah	1.237.078.328	202.199.984

Penurunan nilai piutang Perusahaan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi, untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Apabila ada pembayaran atas piutang yang telah dilakukan penurunan nilai, dilakukan pemulihan dan dicatat sebagai penghasilan lain-lain.

6. PERSEDIAAN

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
<u>Jangka Pendek</u>		
Perlengkapan Operasional Hotel	1.117.740.320	1.117.736.553
Bahan Baku	379.839.207	468.605.295
Sub Jumlah	1.497.579.527	1.586.341.848
<u>Jangka Panjang</u>		
Peralatan Operasional Hotel	1.329.647.278	1.311.079.338
Kerugian Penurunan Nilai	(14.881.628)	(14.881.628)
Sub Jumlah	1.314.765.650	1.296.197.710
Jumlah	2.812.345.177	2.882.539.558

Mutasi Cadangan Penurunan Nilai:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo Awal	(14.881.628)	(10.000.000)
Pencadangan Selama Tahun Berjalan (Catatan 23)	-	(4.881.628)
Saldo Akhir	(14.881.628)	(14.881.628)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai persediaan jangka panjang di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas berkurangnya tamu hotel yang menginap.

Persediaan yang diakui sebagai beban adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Beban Langsung (Catatan 21)	3.512.012.314	8.457.828.798
Jumlah	3.512.012.314	8.457.828.798

Persediaan perlengkapan operasional hotel merupakan persediaan berupa linen dan barang pecah belah serta perangkat pendukung operasional hotel lainnya.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan bahan baku merupakan persediaan berupa bahan baku yang digunakan untuk operasional restoran.

Berdasarkan penelaahan pada akhir tahun berjalan, pihak manajemen berkeyakinan bahwa semua jenis persediaan masih dalam kondisi baik dan masih dapat digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh persediaan Perusahaan tidak diasuransikan. Manajemen akan mempertimbangkan pemberian perlindungan asuransi atas persediaan yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi di masa mendatang.

7. UANG MUKA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Sewa	125.000.000	125.000.000
Pembelian Perlengkapan	98.979.194	635.508.224
Lain-lain dibawah Rp 50.000.000	-	41.400.000
Jumlah	223.979.194	801.908.224

Uang muka pembelian pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah uang muka yang digunakan untuk pembelian perlengkapan operasional hotel seperti fasilitas pendukung dalam kamar hotel, dan fasilitas pendukung operasional hotel lainnya.

Uang muka sewa 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 merupakan uang muka yang digunakan untuk sewa peralatan katering, restoran dan deposit sewa *tenant flamexpress*.

Uang muka lain - lain pada 31 Desember 2025 merupakan uang muka atas uang jaminan deposit untuk pembukaan *tenant* di *foodcourt* Ciputra Mall Semarang dan *security deposit* Queen City.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya berupa dana cadangan untuk penggantian perabotan dan perlengkapan hotel merupakan dana yang secara khusus disisihkan untuk pembelian perabotan dan perlengkapan hotel.

Perusahaan membentuk cadangan untuk penggantian perabotan dan perlengkapan hotel dengan persentase sebesar 1% dari pendapatan hotel yang kemudian dikurangi oleh pembelian peralatan dan perlengkapan operasional hotel tahun berjalan.

Dana secara khusus disisihkan untuk menutupi cadangan dan disimpan dalam rekening bank. Bunga yang diperoleh dari rekening bank tersebut merupakan bagian dari dana cadangan (Catatan 4).

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo Awal	223.571.561	385.265.334
Pembentukan Dana Cadangan	157.173.264	344.832.252
Penggunaan Dana Cadangan	(168.591.194)	(506.526.025)
Saldo Akhir	212.153.631	223.571.561

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP

	30 Juni 2026			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	37.092.000.000	-	-	37.092.000.000
Bangunan dan Prasarana	46.238.596.620	355.694.685	-	46.594.291.305
Peralatan Hotel	14.538.999.183	1.188.078.210	-	15.727.077.393
Peralatan Kantor	423.568.285	7.347.300	-	430.915.585
Kendaraan	475.000.000	-	-	475.000.000
Sub Jumlah	98.768.164.088	1.551.120.195	-	100.319.284.283
Aset Dalam Penyelesaian	6.996.606.614	292.877.045	758.574.328	6.530.909.331
Jumlah	105.764.770.702	1.843.997.240	758.574.328	106.850.193.614
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan Prasarana	5.275.628.717	550.157.742	-	5.825.786.459
Peralatan Hotel	8.209.899.496	1.196.466.223	-	9.406.365.719
Peralatan Kantor	279.159.546	28.024.785	-	307.184.331
Kendaraan	44.531.250	29.687.500	-	74.218.750
Sub Jumlah	13.809.219.009	1.804.336.250	-	15.613.555.259
Nilai Buku	91.955.551.693			91.236.638.355

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	37.092.000.000	-	-	37.092.000.000
Bangunan dan Prasarana	39.863.819.703	6.374.776.917	-	46.238.596.620
Peralatan Hotel	11.458.948.369	3.080.050.814	-	14.538.999.183
Peralatan Kantor	257.003.273	166.565.012	-	423.568.285
Kendaraan	-	475.000.000	-	475.000.000
Sub Jumlah	88.671.771.345	10.096.392.743	-	98.768.164.088
Aset Dalam Penyelesaian	6.619.920.951	8.892.940.370	8.516.254.707	6.996.606.614
Jumlah	95.291.692.296	18.989.333.113	8.516.254.707	105.764.770.702
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan dan Prasarana	4.318.884.027	956.744.690	-	5.275.628.717
Peralatan Hotel	5.750.585.193	2.459.314.303	-	8.209.899.496
Peralatan Kantor	221.936.791	57.222.755	-	279.159.546
Kendaraan	-	44.531.250	-	44.531.250
Sub Jumlah	10.291.406.011	3.517.812.998	-	13.809.219.009
Nilai Buku	85.000.286.285			91.955.551.693

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Beban Langsung (Catatan 21)	550.157.742	956.744.690
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 22)	1.254.178.508	2.561.068.308
Jumlah	1.804.336.250	3.517.812.998

Perusahaan memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan kepemilikan berupa Hak Guna-Bangunan (HGB) No. 00065, seluas 8.620 m² yang berlokasi di Kel. Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah dengan masa berlaku selama 30 tahun yang akan berakhir pada tahun 2045. Pada tanah tersebut didirikan bangunan yang digunakan sebagai hotel dan tanah tersebut atas nama perusahaan.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Aset milik Perusahaan berupa bangunan dan prasarana diasuransikan kepada PT BRI Asuransi Indonesia terhadap risiko kerusakan material dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 7.500.000.000 dan Rp 29.670.114.795 pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Bangunan Hotel yang berada di Jl. R. AKBP Agil Kusumadya 100, Kudus, Jawa Tengah diasuransikan kepada BRI Insurance terhadap risiko kerusakan dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 7.500.000.000 pada tanggal 1 November 2025 sampai dengan 1 November 2026.

Pada tahun 2023, penilaian atas nilai wajar tanah dan bangunan milik Perusahaan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusno Raharjo dan Rekan dengan nama penilai Kusno Raharjo berlaku efektif untuk periode laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2023 sesuai dengan laporannya Nomor: 02106/2.0167-00/PI/09/0002/1/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Sertifikat	Lokasi	Luas (m ²)	Nilai Buku	Nilai Wajar	Surplus Revaluasi
I. Tanah SHGB No. 65	Kudus	8.620 m ²	8.346.529.000	37.092.000.000	28.745.471.000
II. Bangunan dan Prasarana					
648/559/2001	Kudus	1.210,43 m ²			
644/73/15.04/2023	Kudus	561,00 m ²			
644/93/15.04/2023	Kudus	2.065,15 m ²	21.502.003.658	26.278.000.000	4.775.996.342
644.1/72/15.04/2023	Kudus	68,42 m ²			
644/17/15.04/2023	Kudus	368,00 m ²			
Total			29.848.532.658	63.370.000.000	33.521.467.342

Jika tanah dan bangunan dicatat sebesar nilai buku, nilai tercatatnya adalah Rp 29.848.532.658. Perusahaan menggunakan model revaluasian pada tanah dan bangunan dengan mencatat nilai tanah dan bangunan pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Metode penilaian yang digunakan adalah metode pendekatan pasar dan metode pendekatan pendapatan, tidak ada perpindahan level selama periode berjalan.

Menurut manajemen tidak terdapat perubahan signifikan terhadap nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan pada tahun 2025, sehingga tidak dilakukan penilaian nilai wajar pada aset tersebut di tahun 2025.

10. ASET HAK-GUNA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Harga Perolehan	5.530.864.404	5.269.050.846
Akumulasi Amortisasi	(1.317.330.971)	(1.210.581.518)
Jumlah	4.213.533.433	4.058.469.328

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa-menyewa pada tanggal 1 Juli 2015 dengan Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng atas 10 bidang tanah dengan luas masing-masing sebesar 293 m² dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) N0. 3354, 556, 1838, 139, 1911, 1857, 1835, 1837, 1836, 1839 yang digunakan sebagai hotel dan kantor operasional, yang terletak di Desa Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Sewa tersebut untuk periode 30 tahun dengan total nilai sewa sebesar Rp 3.000.000.000 (Catatan 28). Dalam kegiatan sewa-menyewa antara Tn Samuel Jeffrey Christian Soegeng dengan Persero terdapat persyaratan penting yaitu:

- Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengoper hak sewanya atau menyewakan lagi kepada pihak lain, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Tn. Samuel Jeffrey Christian Soegeng.
- Perseroan tidak diperbolehkan meninggalkan tanah dan bangunan selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada suatu pemberitahuan kepada pihak kedua.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan pasal 4 pada perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa:

- Perseroan wajib atas biayanya sendiri memelihara Tanah dan Bangunan dan memperbaiki segala kerusakan yang menurut hukum.
- Jika perjanjian telah berakhir, Perseroan wajib mengembalikan Tanah dan Bangunan dalam keadaan utuh dan berfungsi.
- Perseroan diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang bersifat perbaikan maupun menambah fungsi bangunan atas Tanah dan Bangunan.
- Perseroan diperbolehkan untuk melakukan penambahan daya listrik.

Rincian tanah yang digunakan sebagai aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Nomor Sertifikat	Nama Objek	Luas	Harga Perolehan	Amortisasi	Nilai Saldo 31 Desember 2025
3354	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
556	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1838	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
139	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1911	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1857	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1835	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1837	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1836	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
1893	Tanah	293 M2	553.086.440	131.733.097	421.353.343
Total Nilai Sewa			5.530.864.404	1.317.330.971	4.213.533.433

11. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Toko Ibu Siti	132.920.226	151.231.601
Toko Anugrah Semarang	50.664.500	39.312.000
Toko Al Fiil	46.166.000	37.746.000
Toko Lestari Jaya	45.477.034	50.302.274
Toko Omah Sabun	24.061.000	20.742.000
Toko Muria Pangan Jaya Makmur	23.773.001	-
Toko Ibu Saroh	22.256.950	-
Toko Best One	18.509.000	-
Toko Bima Sakti	16.926.570	-
Alby	12.897.300	-
Toko Morodadi	10.199.486	62.003.429
Lain-Lain dibawah Rp10.000.000	115.269.164	66.897.911
Jumlah	519.120.231	451.029.950

Utang usaha di atas tidak dikenakan bunga. Utang usaha lain-lain merupakan utang pembelian bahan baku restoran. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha.

Rincian umur utang usaha sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Belum Jatuh Tempo	397.787.117	395.114.783
Jatuh Tempo:		
1-30 Hari	121.333.114	55.915.167
31-60 Hari	-	-
Jumlah Bersih	519.120.231	451.029.950

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Sewa Ruangan	223.025.000	156.592.906
Deposit Agen Perjalanan	168.890.519	221.466.519
Restoran	34.279.017	46.828.614
Kamar	32.560.000	72.959.881
Jumlah	458.754.536	497.847.920

13. PERPAJAKAN**a. Utang Pajak**

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	56.548.825	6.175.000
Pasal 23	1.238.559	869.463
Pasal 25	-	50.373.825
Pasal 29		
2026	64.497.254	-
2025	72.897.845	226.336.072
2024	-	206.412.675
Pajak Hotel dan Restoran	331.056.989	340.005.453
Jumlah	526.239.472	830.172.488

Sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan telah merealisasikan pembayaran atas seluruh utang pajak tahun pajak 2024 pada tanggal 25 Maret 2026 sebesar Rp 206.412.675. Saldo utang pajak tersebut telah disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025. Pembayaran tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tahun berjalan.

b. Pajak Penghasilan Badan

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Laba sebelum Pajak menurut laporan laba rugi:	1.519.514.731	4.081.173.767
Koreksi Fiskal:		
Beda Temporer:		
Beban Imbalan Pascakerja	140.324.168	280.648.330
Penyusutan Aset Tetap	(473.105.678)	(809.094.690)
Beda Tetap:		
Sumbangan	16.704.551	38.602.052
Lain-lain	56.929.056	323.066.662
Jumlah Koreksi Fiskal Bersih	(259.147.903)	(166.777.646)
Laba Kena Pajak	1.260.366.828	3.914.396.122
Pembulatan Laba Kena Pajak	1.260.366.000	3.914.396.000

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Beban Pajak:		
Dengan Fasilitas	39.427.851	59.936.421
Non Fasilitas	179.352.798	741.294.279
Taksiran Beban Pajak Kini	218.780.649	801.230.700
Dikurangi Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka:		
Pasal 23	3.161.920	13.478.090
Pasal 25	151.121.475	561.416.538
Jumlah	154.283.395	574.894.628
Taksiran Utang Pajak Kini	64.497.254	226.336.072

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi pada tahun 2025 dan 2024 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan tidak terdapat sengketa atau permasalahan terkait perpajakan yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

c. Liabilitas Pajak Tangguhan

	31 Desember 2025	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Juni 2026
Penyusutan Aset Tetap	(1.087.551.568)	(104.083.249)	-	(1.191.634.817)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	418.663.862	30.871.317	-	449.535.179
Penghasilan Komprehensif Lain dari Revaluasi Aset Tetap	(838.036.684)	-	-	(838.036.684)
Penghasilan Komprehensif Lain dari Imbalan Pascakerja	(25.912.718)	-	-	(25.912.718)
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	(1.532.837.108)	(73.211.932)	-	(1.606.049.040)
	1 Januari 2025	Dikreditkan (Dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2025
Penyusutan Aset Tetap	(909.550.736)	(178.000.832)	-	(1.087.551.568)
Liabilitas Imbalan Pascakerja	382.833.947	35.829.915	-	418.663.862
Penghasilan Komprehensif Lain dari Revaluasi Aset Tetap	(838.036.684)	-	-	(838.036.684)
Penghasilan Komprehensif Lain dari Imbalan Pascakerja	(4.384.843)	4.384.843	(25.912.718)	(25.912.718)
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	(1.369.138.316)	(137.786.074)	(25.912.718)	(1.532.837.108)

PT GRIPHTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN AKRUAL

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Binatu	232.160.882	203.319.875
Listrik	188.608.463	165.879.549
Jumlah	420.769.345	369.199.424

15. UTANG BANK

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Bank Rakyat Indonesia <i>Refinancing</i>	9.212.200.000	9.998.800.000
Bank Rakyat Indonesia	6.565.148.325	7.391.948.325
Sub Jumlah	15.777.348.325	17.390.748.325
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun		
Bank Rakyat Indonesia	1.653.600.000	1.653.600.000
Bank Rakyat Indonesia <i>Refinancing</i>	1.572.285.714	1.572.285.714
Utang Bank Jangka Panjang	12.551.462.611	14.164.862.611

Pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 rincian angsuran di masa mendatang atas utang jangka panjang dari bank adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Jatuh tempo dalam tahun:		
2026	1.612.942.857	3.225.885.714
2027	3.225.885.714	3.225.885.714
2028	3.225.885.714	3.225.885.714
2029	3.225.885.714	2.194.485.714
2030	1.572.285.714	1.572.285.714
2031	1.301.519.755	1.280.285.714
Jumlah	14.164.405.468	14.724.714.284

Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan akta kredit No. 32 tanggal 23 Desember 2024 dihadapan Haji Sugeng Budiman, SH, M.Kn notaris di Kota Semarang dengan ini diberitahukan bahwa permohonan kredit tersebut telah diputus/disetujui Fasilitas Baru KI *Refinancing* PT Griptha Putra Persada sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). Dengan Tipe, Struktur dan Syarat Kredit sebagai berikut:

A. Subjek Kredit:

Nama Peminjam : PT Griptha Putra Persada.
 Penjamin : 1. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng.
 2. Yohana Astri Winarto (Istri Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng).

B. Tipe dan Struktur Kredit

Jumlah Fasilitas : Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).
 Jenis Kredit : KI *Refinancing*.
 Keperluan : *Refinancing* Hotel Griptha yang terdiri dari SHM Nomor 3354, 556, 1838, 139, 1911, 1857, 1835, 1836, 1837 dan 1839 An. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng untuk membiayai kembali Renovasi Hotel.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Bentuk Kredit	:	KI Dinamis dengan Co. Menurun.
Jangka Waktu	:	84 (delapan puluh empat) bulan sejak akad kredit .
Suku Bunga	:	Batas terendah 10,20%/Tahun. Batas tertinggi 12,00%/Tahun.
Provisi	:	Rp 12.500.000 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar sekaligus lunas sebelum akad perjanjian kredit ditandatangani.
Penalty	:	50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan bunga dan atau tunggakan pokok.

Agunan yang diserahkan:

1. Agunan Pokok dan Pengikatan
Tanah dan Bangunan atas SHM No.3354, 556, 1838, 139, 1911, 1857, 1835, 1837, 1836 dan 1839 An. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng di Jl. AKBP R Agil Kusumadya No. 100 Kudus diikat HT I No.00416/2024 sebesar Rp 5.000.000.000.
 2. Agunan Kerugian
Bangunan di atas SHM No.3354, 556, 1838, 139, 1911, 1857, 1835, 1837, 1836 dan 1839 An. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng di Jl. AKBP R Agil Kusumadya No. 100 Kudus diasuransikan minimal sebesar Rp 19.527.000.000.
- Hal – hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenants*) :
Tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, terkecuali telah disetujui oleh bank.
 - b. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali yang sudah saat ini.
 - c. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, dengan cara – cara yang berada diluar praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - d. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri nasabah sendiri.
 - e. Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak lain.

Berdasarkan Akta Kredit No. 63 tanggal 17 April 2013 yang dibuat dihadapan Haji Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di Kota Semarang, Perusahaan memperoleh Kredit Investasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagaimana diubah menjadi perjanjian terakhir berdasarkan Adendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 86 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Plafon Kredit	:	Rp 11.155.000.000
Bentuk Kredit	:	Kredit Investasi
Jangka Waktu	:	84 Bulan s/d 29 Juni 2030
Suku Bunga	:	11,5% p.a

Agunan yang diserahkan:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak-Guna Bangunan (SHGB) No. 00065/Jati Wetan yang berlokasi di Kel. Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah atas nama PT Griptha Putra Persada Tbk.
- 10 (Sepuluh) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3354, 556, 1838, 139, 1911, 1857, 1835, 1837, 1836, 1839 yang berlokasi di Kel. Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah atas nama Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Berikut syarat dan ketentuan *covenant*:

- Hal-hal yang harus dilaksanakan (*Affirmative Covenants*):
 - a. Debitur wajib menyalurkan minimal sebesar 50% dari seluruh transaksi keuangan usaha melalui rekening di Bank, dan menggunakan jasa-jasa perbankan Bank antara lain *SMS banking, SMS notification, mobile banking, internet banking* dan produk *e-channel* Bank;
 - b. Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 90 hari setelah tutup tahun buku yang bersangkutan; dan laporan keuangan (neraca dan rugi/laba) bulanan, yang diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akhir triwulan yang bersangkutan;
 - c. Secara berkala Bank akan melaksanakan pemeriksaan lapangan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan setiap saat Debitur bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank;
 - d. Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dan disampaikan kepada Bank sebelum akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang ditandatangani;
 - e. Debitur wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini;
 - f. Debitur harus segera memberitahu Bank mengenai sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya, tuntutan atas kerusakan yang diderita, dan tuntutan hukum terhadap debitur atau penjamin.

- Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenants*):

Tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari pihak Debitur;
- b) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, dan atau menjaminkan kekayaannya/kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;
- c) Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham dan komposisi permodalan;
- d) Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham atau pihak ketiga lainnya sebelum hutang di pihak Bank dilunasi terlebih dahulu;
- e) Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
- f) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
- g) Melakukan pembayaran atas bunga pinjaman kepada pemegang saham;
- h) Menerima pinjaman/kredit baru dari Bank lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas Bank lain yang sudah ada saat ini;
- i) Menyewakan aset yang diagunkan di pihak Bank kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Bank;
- j) Melakukan penyertaan saham ke anak perusahaan atau perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini, dan sepanjang *cash flow* tidak terganggu serta *Nett Working Capital (NWC)* masih positif;
- k) Menjual mulai jumlah Rp 100.000.000 atau ekuivalennya/menggadaikan dan/atau menjaminkan harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada pihak lainnya, terkecuali yang telah disetujui Bank;
- l) Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset debitur melebihi Rp 10.000.000.000 dalam 1 tahun;
- m) Melunasi dan/atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu;
- n) Jika terjadi penurunan usaha dan kemampuan menyelesaikan hutang jangka pendek mulai terganggu, maka debitur wajib memprioritaskan pembayaran hutang-hutang kepada Bank dibandingkan melunasi hutang pihak ke-3 (tiga) sebelum kredit kepada Bank lunas;
- o) Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan melakukan penyertaan saham kepada Perusahaan lain melebihi Rp 5.000.000.000.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bank Rakyat Indonesia melalui surat No. B.351/KC-VIII/ADK/09/2023 tanggal 27 September 2023, sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dan untuk selanjutnya Perseroan hanya wajib melaporkan kepada Bank Rakyat Indonesia apabila terdapat perubahan kepengurusan, struktur permodalan, pembagian deviden kepada para pemegang saham selama terdapat perjanjian kredit dengan Bank Rakyat Indonesia, perubahan pemegang saham, pengambilan prive serta melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain. Dengan demikian, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Bank Rakyat Indonesia apabila terdapat perubahan-perubahan tersebut, serta persetujuan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham (*IPO*).

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Besarnya imbalan kerja jangka panjang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang "Cipta Kerja". Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan untuk tanggal 31 Desember 2025 dengan nomor laporan 260442/LAA-AAR/III/2026 tanggal 3 Maret 2026.

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan untuk tanggal 31 Desember 2024 dengan nomor laporan 250191/LAA-AAR/I/2025 tanggal 23 Januari 2025.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 65 dan 70 karyawan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo Awal	1.903.017.555	1.740.154.304
Biaya Jasa Kini	94.512.749	189.025.497
Biaya Bunga	45.811.419	91.622.837
Jumlah yang diakui di Laba Rugi	2.043.341.722	2.020.802.638
Jumlah yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain	-	117.785.083
Liabilitas Imbalan Pasti - Akhir	2.043.341.722	1.903.017.555

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Tingkat diskonto per tahun	4,81% - 7,06%	4,81% - 7,06%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,00%	8,00%
Tingkat pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun
Tabel mortalitas	TMI IV / 2019	TMI IV / 2019

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat diskonto akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kenaikan 1%		
Nilai kini	-	1.780.294.237
Penurunan 1%		
Nilai kini	-	2.044.929.242

Perubahan sebesar satu persen pada tingkat kenaikan gaji akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan kerja dan biaya jasa kini:

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kenaikan 1%		
Nilai kini	-	2.061.170.306
Penurunan 1%		
Nilai kini	-	1.763.926.094

17. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA**a) Modal Saham**

Susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	30 Juni 2026		
	Nilai Nominal Rp 25,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT Mulia Jaya Palma	796.000.000	79,60%	19.900.000.000
Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng	4.000.000	0,40%	100.000.000
Masyarakat	200.000.000	20,00%	5.000.000.000
Jumlah	1.000.000.000	100%	25.000.000.000

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2025		
	Nilai Nominal Rp 25,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT Mulia Jaya Palma	701.856.900	70,19%	17.546.422.500
Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng	5.000.000	0,50%	125.000.000
Masyarakat	293.143.100	29,31%	7.328.577.500
Jumlah	1.000.000.000	100%	25.000.000.000

Berdasarkan Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Griptha Putra Persada Tbk No.001/MJP/SK/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, PT Mulia Jaya Palma tercatat kepemilikan saham sebanyak 796.000.000 dan memutuskan menjual saham sebanyak 27.300.000 saham. Dengan demikian, jumlah kepemilikan saham PT Mulia Jaya Palma menjadi 768.700.000 saham.

Berdasarkan Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Griptha Putra Persada Tbk No.002/MJP/SK/IX/2025 tanggal 4 September 2025, PT Mulia Jaya Palma tercatat kepemilikan saham sebanyak 768.700.000 dan memutuskan menjual saham sebanyak 49.468.600 saham. Dengan demikian, jumlah kepemilikan saham PT Mulia Jaya Palma menjadi 719.231.400 saham.

Berdasarkan Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Griptha Putra Persada Tbk No.003/MJP/SK/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025, PT Mulia Jaya Palma tercatat kepemilikan saham sebanyak 719.231.400 dan memutuskan menjual saham sebanyak 9.658.800 saham. Dengan demikian, jumlah kepemilikan saham PT Mulia Jaya Palma menjadi 709.572.600 saham.

Berdasarkan Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Griptha Putra Persada Tbk No. 009/MJP/SK/XI/2025 tanggal 30 November 2025, PT Mulia Jaya Palma tercatat kepemilikan saham sebanyak 709.572.600 dan memutuskan menjual saham sebanyak 7.715.700 saham. Dengan demikian, jumlah kepemilikan saham PT Mulia Jaya Palma menjadi 701.856.900 saham.

Berdasarkan Permohonan Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 50 Tanggal 15 Juni 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia dengan No. AHU-0049215.AH.01.02 Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026.

b) Saldo LabaDitentukan Penggunaannya

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak terdapat batas waktu yang ditetapkan atas pemenuhan kewajiban tersebut. Perusahaan telah membentuk cadangan wajib sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 700.000.000.

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, S.H bahwa rapat tersebut memutuskan dan memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.142.156.993,- dipergunakan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan laba bersih sebesar Rp 700.000.000 sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Sisanya laba bersih tahun 2025 digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dan dicatat sebagai saldo laba.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Tidak Ditentukan Penggunaannya

Merupakan Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan.

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo Laba	6.315.632.548	6.488.110.398

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Tambahan Modal Disetor dari <i>Initial Public Offering (IPO)</i> Penawaran Perdana Saham Sebesar 200.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp 25 yang ditawarkan Rp 103	15.600.000.000	15.600.000.000
Dikurangi dengan Biaya Emisi Saham	(2.281.492.137)	(2.281.492.137)
Jumlah	13.318.507.863	13.318.507.863

19. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Saldo Awal	32.693.576.435	32.601.704.070
Pengukuran Kembali atas Kewajiban Imbalan Pascakerja (Catatan 16)	-	117.785.083
	-	(25.912.718)
Jumlah	32.693.576.435	32.693.576.435

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Perusahaan mengalami keuntungan komprehensif atas pengukuran imbalan pasti.

20. PENDAPATAN USAHA

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Kamar	7.728.143.438	6.514.794.027
Restoran	6.082.434.622	6.272.177.482
Sewa Ruangan	1.906.748.257	1.939.215.286
Jumlah	15.717.326.317	14.726.186.795

Tidak ada transaksi penjualan dari satu pelanggan yang penjualan kumulatifnya melebihi 10% dari penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Tidak terdapat penjualan dan pendapatan usaha yang diperoleh dari pihak berelasi.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. BEBAN LANGSUNG

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Bahan Baku (Catatan 6)	3.512.012.314	3.343.332.562
Gaji dan Tunjangan	1.865.871.298	1.109.789.566
Keperluan Hotel	735.282.232	859.385.999
Listrik	674.473.228	683.039.438
Penyusutan Bangunan (Catatan 9)	550.157.742	470.779.144
Keperluan Gedung	310.463.947	249.211.799
Biaya Amortisasi Aset Hak-Guna (Catatan 10)	106.749.453	87.593.847
Jumlah	7.755.010.214	6.803.132.355

Tidak ada transaksi pembelian dari satu suplier yang pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari total beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Gaji dan Tunjangan	2.575.484.150	2.516.709.791
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	1.254.178.508	1.181.781.312
Utilitas	354.873.447	256.325.314
BPJS	255.837.802	259.740.893
Jasa Profesional	241.038.612	267.145.803
Pemeliharaan	232.564.628	286.703.291
Imbalan Pascakerja (Catatan 16)	140.324.168	118.588.764
Alat Tulis dan Perlengkapan	122.574.867	268.106.661
Perjalanan Dinas	84.784.484	141.552.440
Iklan dan Pemasaran	81.392.737	96.786.041
Biaya Pajak	49.760.394	38.553.850
Sewa	29.039.439	-
Sumbangan	16.704.551	10.766.066
Lain-Lain (dibawah Rp 30.000.000)	79.759.557	-
Jumlah	5.518.317.344	5.670.140.238

23. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Pendapatan Lain	43.345.476	18.616.295
Beban Administrasi Bank	(75.398.693)	(37.532.592)
Jumlah	(32.053.217)	(18.916.297)

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan atas penjualan barang bekas, *member fitness* dan renang, mini *market pool*, salon dan tiket renang harian.

24. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Pendapatan Bunga	453.142	1.500.434
Biaya Bunga Pinjaman Bank	(892.883.953)	(728.225.543)
Jumlah	(892.430.811)	(726.725.109)

PT GRIPHTA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

25. LABA PER SAHAM

	2026 (6 Bulan)	2025 (6 Bulan)
Laba untuk Perhitungan		
Laba Per Saham	1.227.522.150	1.175.581.388
Jumlah Saham	Lembar	Lembar
Jumlah Saham untuk perhitungan Laba per Saham	1.000.000.000	1.000.000.000
Laba per saham	1,23	1,18

26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan					
	Saldo Awal 1 Januari 2026	Penerimaan	Pembayaran	Perubahan Transaksi Non-Kas	Saldo Akhir 30 Juni 2026
Utang Bank	17.390.748.325	-	(1.613.400.000)	-	15.777.348.325
Jumlah	17.390.748.325	-	(1.613.400.000)	-	15.777.348.325

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan					
	Saldo Awal 1 Januari 2025	Penerimaan	Pembayaran	Perubahan Transaksi Non-Kas	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Utang Bank	16.025.920.627	6.000.000.000	(4.635.172.325)	-	17.390.748.325
Jumlah	16.025.920.627	6.000.000.000	(4.635.172.325)	-	17.390.748.325

27. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perusahaan melakukan transaksi usaha kepada pihak-pihak berelasi dimana menurut manajemen dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
Tn. Samuel Jeffrey Christiawan	Pemegang Saham	Liabilitas Sewa

28. IKATAN**a. PT Djarum**

Perjanjian kontrak Nomor 004/MKT-CR/HG/I/2025 tanggal 1 Januari 2024 antara Perseroan dengan PT Djarum, dimana Hotel Gripta menyediakan kamar bagi Djarum sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.

b. PT Bukit Muria Jaya

Perjanjian kontrak Nomor 007/MKT-CR/HG/I/2025 tanggal 1 Januari 2024 Perseroan dengan Polytron Kudus, dimana Hotel Gripta menyediakan kamar bagi Polytron sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

c. Rumah Sakit Mardi Rahayu

Perjanjian kontrak Nomor 002/MKT-CR/HG/I/2025 tanggal 1 Januari 2024 antara Perseroan dengan Rumah Sakit Mardi Rahayu, dimana Hotel Griptha menyediakan kamar bagi tamu sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian ini berlaku mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2025.

d. Perjanjian Sewa - Menyewa

Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 1 Juni 2024 oleh dan antara CV Anugerah Karya Abadi dengan Oei Aqlia Jemmy Priyanto selaku Direktur PT Griptha Putra Persada Tbk dengan obyek sewa berupa bangunan ruko Kompleks Aksara Kudus yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kend. Ahmad Yani, Krajan, Panjuran, Kudus, Jawa Tengah. Perjanjian ini berlaku sah untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 dengan harga sewa ruko Rp 77.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun.

Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 20 September 2024 oleh dan antara CV Anugerah Karya Abadi dengan Oei Aqlia Jemmy Priyanto selaku Direktur PT Griptha Putra Persada Tbk dengan obyek sewa berupa bangunan ruko B yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Pawiyatan Luhur, Semarang. Perjanjian ini berlaku sah untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan harga sewa ruko Rp 177.310.800 untuk jangka waktu 1 tahun.

Perjanjian Sewa-Menyewa tanggal 16 Maret 2024 oleh PT Sriratu Megahtama dengan objek sewa berupa ruangan di Queen City Mall yang beralamat di Jalan Pemuda, Semarang. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dengan total harga sewa Rp 194.328.000.

e. Perjanjian Fasilitas Pinjaman

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Nomor 001/GPP/DIR/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 antara Perseroan dengan Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng dimana Perseroan memerlukan tambahan dana untuk modal kerja dan investasi dan bermaksud untuk meminjam sejumlah dana kepada Tn. Samuel Jeffrey Christiawan Soegeng yang merupakan pemegang saham Perseroan. Jangka waktu perjanjian dimulai pada 1 Agustus 2017 sampai 1 Agustus 2027. Perjanjian ini telah dilunasi pada 14 Juni 2023.

29. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

	Biaya Perolehan Diamortisasi
	30 Juni 2026
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	173.611.399
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	1.237.078.328
Jumlah Aset Keuangan	1.410.689.727
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Bank	3.225.885.714
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	519.120.231
Beban Akrua	420.769.345
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	12.551.462.611
Jumlah Liabilitas Keuangan	16.717.237.901

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Biaya Perolehan Diamortisasi
	31 Desember 2025
Aset Keuangan Lancar	
Kas dan Bank	604.378.679
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	202.199.984
Jumlah Aset Keuangan	806.578.663
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	
Utang Bank	3.225.885.714
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	451.029.950
Beban Akruai	369.199.424
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	
Utang Bank	14.164.862.611
Jumlah Liabilitas Keuangan	18.210.977.699

30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL**a. Manajemen Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor. Direksi Perusahaan secara berkala akan melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi akan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko kredit Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

b. Manajemen Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas bank dan fasilitas simpan pinjam dengan terus - menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel Risiko Likuiditas dan Suku Bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal dimana Perusahaan mungkin akan diminta untuk membayar.

PT GRIPTHA PUTRA PERSADA Tbk**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Lanjutan)**

Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2025

dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2026		
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga Beban Akrua	420.769.345	-	420.769.345
Dengan Bunga Utang Bank	3.225.885.714	12.551.462.611	15.777.348.325
Jumlah	3.646.655.059	12.551.462.611	16.198.117.670
	31 Desember 2025		
	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Jumlah
Tanpa Bunga Beban Akrua	369.199.424	-	369.199.424
Dengan Bunga Utang Bank	3.225.885.714	14.164.862.611	17.390.748.325
Jumlah	3.595.085.138	14.164.862.611	17.759.947.749

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Direksi menganggap bahwa nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat bunga pasar.